

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global untuk mewujudkan keberlanjutan dari negara maju hingga berkembang. Negara Indonesia mengimplementasikan program ini dalam Agenda SDGs 2030. Muatan yang terdapat dalam SDGs saling bersinambungan dengan tujuh belas tujuan. Muatan ketujuh belas tujuan ini mencakup empat pilar, salah satunya mengenai pilar pembangunan lingkungan. Pilar lingkungan termuat dalam tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sektor yang paling dominan dalam pelestarian lingkungan mengenai pembangunan ekosistem berkelanjutan.

Lingkungan hidup merupakan bentuk keruangan dari beberapa aspek dan tindakannya memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan (Manik, 2016). Hal ini, diperkuat dengan penjelasan dari Said (2019) yang secara sederhana memberikan penjelasan bahwa lingkungan hidup merupakan daerah tempat suatu makhluk hidup berada. Peraturan yang menjadi dasar ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan di Indonesia juga diperkuat dengan adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini bermaksud guna mengatasi permasalahan isu lingkungan yang didominasi oleh sampah, limbah B3, alih fungsi lahan, deforestasi, kualitas dan kualitas air (KLHK,2020). Namun, isu mengenai sampah banyak terjadi pada kondisi sekarang. Hal yang mendasari bahwa lingkungan rusak adanya

sampah yang berserakan dan memiliki potensi besar menjadikan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan.

Sampah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan benda padat yang dihasilkan dari aktivitas keseharian manusia. Sampah menjadi barang habis sisa dengan keberadaannya kurang bermanfaat. Sampah memiliki kandungan racun dapat menyebabkan penyakit. Sampah dinilai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.

Timbulan sampah pada saat ini sejumlah 13.197.631,36 ton per tahun dengan persentase sampah tidak terkelola sebanyak 27,97% (SIPSN,2022). Timbunan sampah sebanyak ini tentu akan berdampak buruk bagi keberjalan sebuah lingkungan. Berdasarkan pada komposisi jenis sampah, paling banyak dari jenis makanan sisa dan bersumber sampah keluarga. Selanjutnya permasalahan ini dapat mengakibatkan pencemaran pada lingkungan, yakni pencemaran air, udara, efek rumah kaca, dan tempat berkembangbiak penyakit. Pemerintah sudah banyak melakukan perbaikan guna penanganan sampah melalui berbagai program yang telah dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa fasilitas yakni mulai dari hulu, hilir, dan muara guna pengurangan sampah. Masing-masing daerah di Indonesia telah ada mekanisme pengelolaan sampah dengan didukung adanya regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, juga didukung otonomi daerah guna mengelolaa sampah dengan mandiri agar lebih meningkatkan kemajuan daerahnya.

Provinsi Jawa Timur memiliki padat penduduk dikarenakan terdapat banyak kota-kota besar. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,49, sedangkan pada tahun 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,92. Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwasannya kualitas lingkungan hidup sedang. Tentu, dengan rating sedang Provinsi Jawa Timur masih banyak terdapat permasalahan mengenai pencemaran lingkungan. Hal ini, selaras dengan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang merupakan daerah seluas 115.950 Ha atau bisa dipahami daerah yang memiliki 2,5% dari luasannya Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, dan 1.258 dusun (Diskominfo Kabupaten Jombang, 2022). Rata-rata jumlah penduduk terjadi penambahan sebesar 15.574 penduduk per tahun 2022. Berdasarkan demografinya di Kabupaten Jombang dominasi umur produktif dengan fokus pada Kecamatan Jombang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan Disdukcapil dalam (Diskominfo Kabupaten Jombang, 2022). Banyaknya penduduk menjadi hal yang harus disikapi dengan bijak utamanya melalui pembentukan regulasi yang tepat dan benar. Salah satu permasalahan imbas tingginya jumlah penduduk mengenai permasalahan sampah.

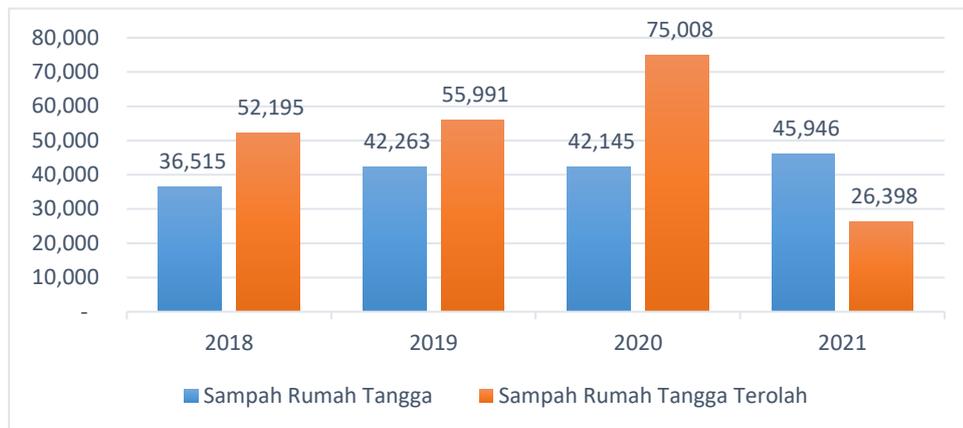
Mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang ini sangat erat kaitannya dengan peranan kelembagaan. Nugroho (2013) memberikan penjelasan bahwa program pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan secara aktif karena gagalnya mekanisme kelembagaan. *Pertama*, gagal dalam perencanaan, dimana

kebijakan dan regulasi kurang memberikan penyelesaian masalah, menyebabkan biaya meningkat, hubungan kurang berlaku, dan internalisasi eksternalitas kurang diterapkan. *Kedua*, kurang kapabilitas organisasi yang kurang mampu menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kelembagaan berhasil didasari atas kerjasama antar lembaga didalamnya yang saling bersinergi secara optimal. Lembaga dalam hal ini bukan hanya unsur pemerintah saja, melainkan ada beberapa pihak yang berupa lembaga non-pemerintah yang terlibat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah bahwa peran serta pihak selain pemerintah juga mempunyai urgensi yang penting.

Berdasarkan analisis di Kabupaten Jombang terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah. *Pertama*, pengurangan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan manajerial sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dengan terdiri dari empat aktor yakni pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan bupati. Hal ini berbanding terbalik dengan masalah timbulan jumlah sampah yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan signifikan. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, di Kabupaten Jombang terdapat penambahan 10.875 ton sampah rumah tangga. Berikut ini merupakan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang 2022 yang memberikan informasi akan timbulan sampah rumah tangga dan sampah terolah, yakni sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Volume Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Terolah dari Tahun 2018-2021

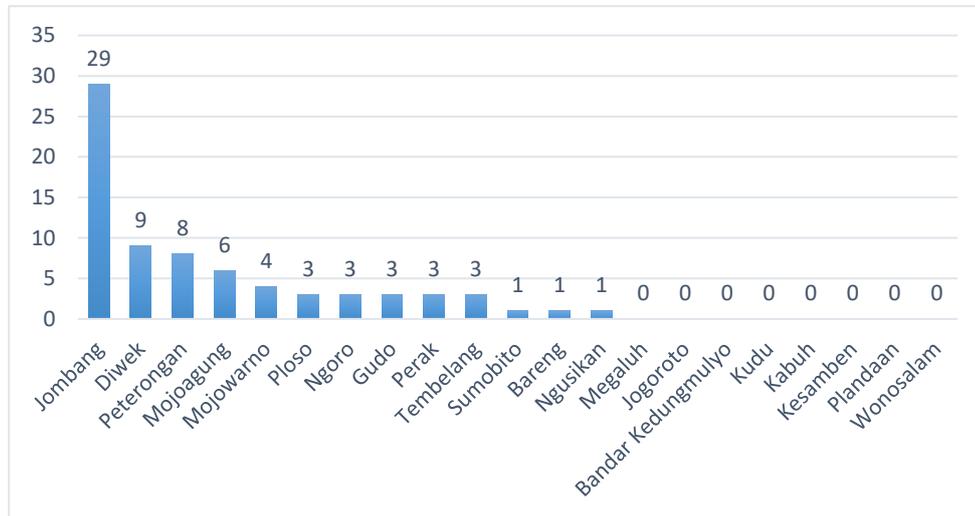


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
(Telah Diolah Kembali, 2023)

Kedua, penanganan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan persampahan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perda Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah kegiatan penanganan meliputi pemilahan, pengumpulan ke TPS atau TPS 3R, bank sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai keharusan dalam pembentukan, pemeliharaan dan pengembangannya mengenai TPS, TPST, PDU, dan TPA. Namun, hal ini belum dilakukan secara baik yakni adanya permasalahan mengenai jumlah tempat pengolahan sampah (TPS) di Kabupaten Jombang yang masih belum merata ketersediaannya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2022 yang menunjukkan mengenai jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) per kecamatan tahun 2021 (unit), yakni sebagai berikut,

Gambar 1. 2 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Per Kecamatan Tahun 2021 di Kabupaten Jombang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
Telah Diolah Kembali (2023)

Ketersediaan tempat pengolahan sampah di Kabupaten Jombang masih belum merata. Pengolahan sampah hanya tersedia di Kecamatan Jombang, Diwek, Peterongan, Mojoagung, Mojowarno, Ploso, Ngoro, Gudo, Perak, Tembelang, Sumobito, Bareng, dan Ngusikan. Sementara, di delapan kecamatan lainnya masih belum ada tempat pengolahan sampah. Jumlah pengolahan masih tidak merata ini tentu akan berdampak pada intensitas limbah.

Ketiga, penerapan proses pemilahan yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini, menjelaskan bahwa pemilahan sampah menjadi tanggungjawab masing-masing individu di sumbernya, pengelola kawasan, dan pemerintah daerah. Namun, pada tiap aktor atau lembaga yang terikat didalamnya belum melakukan secara baik. Berikut ini kutipan mengenai

permasalahan kurangnya mekanisme pemilahan sampah yang dilakukan pelaku usaha di Kabupaten Jombang,

“Kondisi sekunder Rejoagung yang terdampak limbah di Dusun Pesantren Jombang. Ada 80 pelaku usaha, dari sisi IPAL Komunal hanya mampu terisi tidak lebih setengahnya, sehingga sisanya dibuang ke sungai.” (Sumber: radarjombang.jawapos.com)

Kasus yang dilakukan pelaku usaha tentu sangat berlawanan dengan mekanisme pemilahan sampah yang harus dilakukan pelaku usaha yakni dengan mengelompokkan paling sedikit menjadi lima jenis sampah agar tidak menjadi pencemaran lingkungan. Klasifikasi pengelompokannya terdiri dari sampah kandungan bahan berbahaya dan beracun, mudah diurai, dan pengelolaan sampah sejenisnya.

Keempat, pengumpulan sampah yang tidak dilakukan secara maksimal oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. Mekanisme pengumpulan dilakukan oleh pengelola (komunitas), masyarakat, dan pemerintah daerah. Pengumpulan sampah ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan tempat mengumpulkan limbah yakni dari TPS, TPS 3R, PDU, dan peralatan pengumpul sampah.

Kelima, pengangkutan sampah dalam kelembagaannya sebagai pelaksana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang masih belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini, berkewajiban dalam menyediakan alat angkut sampah dan melakukan mekanisme pengangkutan sampah baik dari TPS, TPST, PDU, dan TPS 3R ke TPA.

“Dengan jumlah 306 desa/kelurahan yang mendapatkan pelayanan 110 desa atau secara persentase sejumlah 35%. Masalah utamanya dari SDM, dan selain itu dari sisi sarana prasarana mulai dari TPS, container, dan armada angkutnya, masih belum siap.” (Sumber: jatimnow.com).

Oleh karena itu, dalam hal pengangkutan di Kabupaten Jombang masih belum optimal dari sisi kelembagaan dan juga sarana prasarana masih kurang mendukung.

Keenam, penyelenggaraan kelembagaan dalam penerapan pengolahan sampah tidak dilakukan dengan baik. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengolahan sampah meliputi pemadatan, penimbunan, pengomposan, daur ulang, pemanfaatan untuk energi, dan pengolahan sampah melalui teknologi ramah lingkungan. Mekanisme pengolahan sampah ini secara realisasinya sangat jauh dari kata baik, mengingat masih banyak pihak atau aktor yang melakukan penyelewengan dari kewajiban yang sudah tertera dalam Perda.

“Perhitungan Tim Satgas Santri Jogo Kali (SJK) dalam pengangkutan sampah selalu full terisi. Hal ini menandakan tingkat kesadaran yang masih rendah masyarakat sehingga dibuang ke sungai.” (Sumber: kabarjombang.com).

Ketujuh, pelaksanaan pemrosesan akhir melalui TPA yang masih belum dijalankan dengan baik. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pendukung. Namun, pelaksanaannya masih belum berhasil karena masih belum dijalankan secara menyeluruh dari beberapa fasilitasnya, yakni dari fasilitas perlindungan lingkungan dan fasilitas penunjang.

“Meskipun telah terbit Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, aturan ini belum dapat direalisasikan dengan baik menjawab persoalan hulu ke hilir.” (Sumber: kanalindonesia.com)

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Apabila tidak ada upaya solutif dan pengelolaan secara efektif dan efisien akan sangat memungkinkan adanya

kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang. Hal ini terjadi karena adanya ekosistem lingkungan yang tidak seimbang dan menyebabkan pencemaran adanya limbah sampah menggunung di TPA Banjardowo. Upaya pengelolaan sampah harus dilakukan di Kabupaten Jombang. Langkah strategis tersebut dapat diimplementasikan oleh optimalisasi pelayanan kelembagaan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjabaran latar belakang sebelumnya, ditemukan identifikasi permasalahan yang dilakukan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
2. Penanganan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang
3. Pemilahan sampah yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
4. Pengumpulan sampah yang tidak dilakukan secara maksimal oleh para aktor yang terlibat di dalamnya

5. Pengangkutan sampah dalam kelembagaannya sebagai pelaksana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang masih belum dilakukan secara optimal
6. Penyelenggaraan kelembagaan dalam penerapan pengolahan sampah tidak dilakukan dengan baik
7. Pelaksanaan pemrosesan akhir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di TPA yang masih belum dijalankan dengan baik

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang sebelumnya, ditemukan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana tinjauan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk memahami kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat penelitian menjadi tolak ukur dalam mengetahui ketercapaian tujuan penelitian,

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat guna memperluas pemahaman dan pengalaman bagi peneliti. Kemudian, dapat meningkatkan pemahaman Ilmu Administrasi Publik yang sudah dipelajari melalui fokus analisis tinjauan kelembagaan. Dengan demikian, peneliti mampu mengetahui metode dan teori-

teori yang tepat dipergunakan sebagai acuan untuk dibandingkan dengan penelitian lain yang relevan dengan topik kelembagaan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai pemberian informasi kepada masyarakat sasaran manajerial sampah di Kabupaten Jombang. Bagaimana bentuk pelaksanaan kelembagaan dalam implementasi pengelolaan sampah secara optimal melalui perannya masing-masing. Melalui basis regulasi dan pembagian struktur dan kewenangan yang jelas antar masing-masing lembaga menjadikan masyarakat lebih memahami.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi bentuk kelembagaan dalam manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang guna mencegah kerusakan lingkungan. Serta dapat dijadikan saran dan masukan kepada lembaga terkait untuk melakukan beberapa mekanisme pelayanan publik lebih optimal terkhusus pada masalah pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan di Kabupaten Jombang.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul, Tahun, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, Muhammad Barqah Prantama. "Desain Kelembagaan BUMDES: Menelaah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Maju Bersama, Kabupaten Malang." 2023. International	Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai desain kelembagaan BUMDES Maju Bersama di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.	Penelitian ini mempergunakan Teori Institutional Analysis and Development (IAD) milik Ostrom. Indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini, <i>a) Biophysical Condition</i> <i>b) Attributes of Community</i> <i>c) Rules in Use</i> <i>d) Action Situations</i> <i>e) Outcomes</i> <i>f) Evaluative Criteria</i>	Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa <i>a) Biophysical condition</i> para pengelola BUMD mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka dengan sangat baik <i>b) Attributes of Community</i> kemampuan dari para pengelola dalam merubah	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

	Journal of Demos (IJD).				ketidakpercayaan masyarakat menjadi sebuah kepercayaan yang menguntungkan BUMD c) Rules in use yakni sebuah norma AD dan ART BUMD Maju Bersama dapat mengendalikan peran dan posisi bagi tiap aktor.	
2.	Putri Arumsari, Sofia M. Alisjahbana, dan Ayomi Dita Rarasati. "Analisis Kelembagaan dan Finansial untuk Pemeliharaan dan Perawatan Rusunawa Berdasarkan <i>Soft System</i>	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis semua permasalahan yang terjadi di rusunawa serta mengembangkan sebuah soft model melalui pendekatan SSM untuk menggambarkan situasi keseluruhan dari permasalahan	Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah <i>Soft System Methodology</i> (SSM) oleh Peter Checkland, dengan mempergunakan lima tahapan yakni, a) Apa situasi permasalahan b) Rumuskan situasi permasalahan	Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui tahapan SSM	Hasil penelitian bahwa melalui penggunaan SSM alternatif skema kelembagaan yang diusulkan sebagai badan pengelola bangunan rusunawa adalah UPT/UPRS, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, koperasi, PPPSRS, dan Asosiasi Perumahan.	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

	<i>Methodology.</i> ” 2022. JMITS: Jurnal Mitra Teknik Sipil	pengelolaan pada bangunan rusunawa.	c) Definisi akar (analisis CATWOE) d) Model konseptual e) Membandingkan model dengan persepsi pada situasi permasalahan		Sedangkan, alternatif finansial melalui pendanaan pemerintah dan BUMN/BUMD dan KPBU	
3.	Lunariana Lubis, Agus Wahyudi, dan Deasy Arieffiani. “Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Ipal Komunal.” 2022. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial.	Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengkaji kelembagaan dan juga faktor-faktor yang menunjang juga menghambat pada pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat pada Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola IPAL Komunal.	Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kelembagaan Baru dari Nuraini, dkk. (2016). Ketiga pilar yang dipergunakan yakni, a) Pilar regulatif b) Pilar normatif c) Pilar kultural kognitif	Penelitian ini mempergunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan analisa kelembagaan dalam tiga pilar yakni pilar regulatif, normatif, kultural kognitif. Keberlanjutan kelembagaan IPAL Komunal di RT 01 RW 01 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya mengalami stagnasi.	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

4.	Trisla Warningsih, Wardatul Hidayah, dan Rasoel Hamidi. "Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati." 2020. Jurnal Sositologi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati	Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini mengenai teori stakeholders oleh Reed et al (2009)., dengan empat aspek, a) Key player b) Context setter c) Subject d) Crowd	Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah campuran	Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi, <i>key player</i> (pengelola, kepala desa, bupati, dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi, dan dinas lingkungan hidup kabupaten), <i>context setters</i> (DPRD), <i>crowds</i> (Dinas PU, Bappeda, Dinas Perikanan, LSM, dan PT), dan <i>Subject</i> (masyarakat dan tokoh masyarakat).	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.
5.	Clara Shinta Paskasari, Budi Guntoro, dan Roso Witjaksono. "Kapasitas	Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan secara mendalam tentang segala temuan yang berkaitan	Teori yang dipergunakan ini menurut Horton et al (2003) yakni terdapat tiga hal yang mendasarinya,	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan	Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, a) Kapasitas kelembagaan pengelola desa	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

	Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman.” 2020. Jurnal Pariwisata Terapan.	dengan strategi penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata di Brajan	<ul style="list-style-type: none"> a) Manajemen proses dan program b) Kepemimpinan strategis c) Jejaring dan hubungan 	pendekatan kualitatif	<p>wisata brajan dari aspek manajemen dapat dilihat dari kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jejaring dan hubungan stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Kapasitas kelembagaan pengelola Desa Wisata Brajan dilihat dari aspek pengelolaan SDM masih kurang baik c) Kapasitas pengelola Desa Wisata Brajan dilihat dari partisipasi pengurus masih kurang karena banyak pengurus yang tidak aktif. 	
--	--	---	--	-----------------------	--	--

6.	Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, dan Sulistya Ekawati. "Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara." 2019. Jurnal Inovasi.	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut dan memberi masukan penguatan kelembagaan implementasi Program PS.	Penelitian ini mempergunakan teori kelembagaan menurut Nugroho (2016) dengan empat komponen yakni sebagai berikut, a) Struktur kelembagaan b) Karakteristik sumberdaya c) Perilaku aktor d) Kinerja	Metode yang dipergunakan adalah campuran yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi Program PS di Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik dan berkategori rendah.	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.
7.	Svitlana Kushnir. "Factor Analysis of Institutional Support of Agrarian Sector of Ukraine." 2019. Economic Analysis.	Tujuan artikel ini untuk mempelajari faktor makro ekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian berdasarkan analisis peringkat internasional Ukraina	Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini mengenai faktor ekonomi makro dengan indikator sebagai berikut, a) Kelembagaan b) Demografi c) Sosial ekonomis d) Keuangan ekonomis e) Secara eksternal ekonomis f) Secara ilmiah teknis g) Informasi analitis	Metode yang dipergunakan adalah kuantitatif dan kualitatif (pendekatan campuran)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Ukraina mempunyai beberapa faktor yang cukup menarik bagi calon investor, termasuk beberapa perbaikan dalam lingkungan bisnis dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang sebagian disebabkan adanya reformasi	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

			h) Politik i) Organisasi pengelolaan		struktural dengan didukung oleh lembaga keuangan internasional.	
8.	Min Raj Paudel. "A Comparative Analysis of Institutional and Non-Institutional Direct Private Cost in Higher Education of Nepal." 2019. Interdisciplinary Research in Education.	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan biaya privat langsung institusional dan non-institusional.	Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini mengenai mekanisme dan satuan pembiayaan oleh Psacharopoulos dan Woodhall (1995)	Penelitian ini mengikuti desain penelitian deskriptif dan analitik dengan pendekatan inkuiri kuantitatif	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa per siswa rata-rata biaya unit kelembagaan terkait perguruan tinggi adalah Rs 24730.57, biaya kelembagaan terkait universitas adalah Rs 5982,23 dan total biaya unit kelembagaan tahunan adalah Rs 30712,80. Demikian pula, ditemukan bahwa seorang siswa membelanjakan Rs 46411,63 sebagai biaya pribadi langsung non-lembaga dalam setahun. Total biaya pendidikan	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

					swasta langsung rata-rata tahunan (institusional plus non institusional) adalah Rs 77124,43 di tingkat sarjana perguruan tinggi berbasis komunitas di ibu kota Nepal.	
9.	Robin Neef, Tim Busscher, Stefan Verweij, dan Jos Arts. "Mapping Institutional Change: Analysing Strategies for Institutional Design in Collective Infrastructure Renewal." 2022. European Policy Analysis.	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi desain kelembagaan dan mengeksplorasi bagaimana mereka mempengaruhi perubahan kelembagaan.	Teori yang dipergunakan mengenai teori desain kelembagaan yang mempergunakan enam indikator, sebagai berikut, <i>a) Network composition strategies</i> <i>b) Network outcomes</i> <i>c) Network interaction strategies</i> <i>d) (re) frame strategy</i> <i>e) Puzzling</i> <i>f) Powering</i>	Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan studi komparatif untuk mengidentifikasi perubahan kelembagaan dan strategi desain kelembagaan yang dipergunakan untuk mempengaruhi	Temuan kunci termasuk itu kelembagaan perubahan posisi, batasan, pilihan, dan aturan informasi pertama kondusif untuk kolektif tindakan. Selain itu, mimikri terutama aturan pilihan sangat penting. Selanjutnya strategi desain kelembagaan memiliki sifat konfigurasional: strategi tingkat	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

				arah kelembagaan	mikro memiliki konsekuensi mesolevel, dan beberapa konfigurasi memicu perubahan, sedangkan yang lain menyebabkan dinamika kelembaman.	
10.	Tanu Jain dan Satyendra P. Singh. "Impact of Domestic Institutional Investors on Foreign Institutional Investors in India: An Analysis." 2020. Management Dynamics.	Penelitian ini bertujuan dalam mengevaluasi dampak keputusan inflow dan outflow investor institusi domestik terhadap asing keputusan arus masuk dan arus keluar investor institusional di India dan mengetahui apakah ada hubungan kontras antara keputusan pembelian dan penjualan investor	Penelitian ini mengeksplorasi dengan penerapan Domestic Institutional Investors yang berpengaruh pada keputusan investasi Foreign Institutional Investors di India.	Metode yang dipergunakan adalah kuantitatif	Hasil penelitian memberikan pemahaman bahwasannya keputusan investasi DII berpengaruh terhadap keputusan investasi FII	Fokus penelitian yang diamati berbeda, dan teori yang dipergunakan oleh penulis juga berbeda.

		institusi asing dan domestik di India atau tidak.				
--	--	---	--	--	--	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu (Sumber: Diolah Penulis,2023)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Keterbaruan yang dipergunakan dengan adanya penggunaan teori kelembagaan dalam menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Penelitian terdahulu diatas tidak ada sama sekali yang mempergunakan teori kelembagaan utamanya teori milik Burke & Litwin (1992). Dengan adanya keterbaruan ini menjadi novelty penelitian ini dan memberikan pemahaman baru penerapan teori kelembagaan dalam konteks pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi asli kata dari Bahasa Yunani, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan "*administer*", sehingga secara mudah administrasi merupakan aktivitas melayani, menjadi pemimpin, melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pengurusan terhadap usaha. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa administrasi menjadi kegiatan catat mencatat atau dalam modern ini dinamakan tata usaha. Dalam arti yang lebih luas administrasi merupakan kerjasama aktif yang diimplementasikan oleh sekumpulan orang guna mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan.

Publik mempunyai pengertian umum, negara, dan ekosistem masyarakat secara universal. Jefkins (dalam Abdussamad, 2021) memberikan penjelasan bahwa publik merupakan kumpulan orang yang saling berkomunikasi secara eksternal atau internal. Ruslan (dalam Abdussamad, 2021) memberikan penjelasan bahwasannya publik merupakan kumpulan individu yang mempunyai keterikatan dengan hubungan secara solid.

Definisi Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) merupakan mekanisme yang berhubungan dengan sumber daya yang diupayakan dalam mengelola, mengatur, dan implementasi hasil kebijakan publik. Administrasi publik berkaitan juga dengan seni dan ilmu dalam manajerial urusan publik. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:8) memberikan penjelasan akan masalah yang dihadapi manusia selalu mengalami peningkatan dan semakin kompleks.

Paradigma menjadi mekanisme untuk memandang, harga, cara, suatu prinsip dasar, atau cara dalam pemecahan permasalahan, dengan dipedomani oleh suatu negara pada periode tertentu (Keban, 2014). Nicholas Henri Menyajikan 5

paradigma administrasi publik. Namun, terdapat pembaharuan dengan adanya paradigma mutakhir yang bernama *paradigma of public administration as governance* (sejak 1990).

Paradigma 1 (1900-1926) "*The Politics Administration Dichotomy*" yakni bentuk pemisahan politik dan fungsi pemerintahan sebagai upaya teknik guna melakukan peningkatan efisiensi dan *collaborative governance* dalam pandangan administrasi publik. Gagasan ini dibawa oleh Woodrow Wilson dalam publikasi esai "*The Study of Administration*" yang dimuat di *Political Science Quarterly*, tahun 1897. Woodrow Wilson menjelaskan terdapat empat hal yang menjadi landasan keefektifan, yaitu, (1) pembedaan politik dan administrasi; (2) komparasi organisasi politik dan swasta; (3) optimalisasi efisiensi dengan kegiatan praktik dan sikap bisnis terhadap proses keseharian dan (4) peningkatan efektivitas layanan publik dengan mekanisme manajerial dan pengembangan pegawai, dengan mendukung penilaian didasarkan kontribusi dan capaian.

Paradigma 2 (1927-1937) paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Willoughby, Gullick & Urwick menjadi tokoh yang menemukan prinsip ini dan hingga sekarang dikenal dengan POSDCORB. Paradigma 3 (1950-1970) "*Public Administration as Political Science*", digambarkan sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Adanya harapan para ilmuwan politik agar dapat mengambil kembali administrasi publik menjadi konteks studi politik. Paradigma 3 menerapkan upaya guna melakukan pembangunan hubungan konseptual diantara administrasi pada periode tersebut. Oleh karena itu, diupayakan sebagai hasil pembaharuan yang telah dilaksanakan.

Paradigma 4 (1956-1970), Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Perkembangan paradigma ini mempunyai dua fokus utama yakni secara orisionalitas melalui disiplin psikologi sosial dan peninjauan dalam kebijakan publik. Fokus dari paradigma 4 ini lebih fleksibel mengingat orientasinya lebih kepada lingkup administrasi yang menyebabkan lokus dalam pembahasannya abstrak untuk dilakukan pengajian.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma mutakhir yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pandangan ini berfokus pada focus dan lokus spesifik (Keban, 2014). Fokus paradigma ini ialah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya ialah problematika dan *interest* publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang), Paradigma ini berhubungan dengan perwujudan pemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan pelayanan inklusif dan pengembangan aspek pendukung guna ketercapaian kepuasan dalam masyarakat mendapatkan fasilitas layanan pemerintah. Saat ini *governance* mendapatkan perhatian penuh dari multinegara dengan ajakan UNDP dengan istilah "*good governance*". Karakteristik dari *good governance* dari UNDP menurut Rondinelli dalam (Keban, 2014) meliputi *Participation, Rule od law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness, Accountability*, dan *Strategic Vision*.

Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ini termasuk dalam paradigma ke-6 yaitu paradigma *governance*. Paradigma *governance* memfokuskan pada tujuan negara untuk melakukan pelayanan yang baik dan layak kepada publik

untuk mendapatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Paradigma governance ini menitik beratkan pada arah pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dengan pemberian pelayanan publik yang baik serta peningkatan kinerja para petugas guna mencapai kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

1.6.3 Manajemen

Manajemen merupakan penerapan sumber daya dengan efektif guna ketercapaian target atas jalannya perusahaan dan organisasi. Marry Parker Follet dalam Nawawi (2000) menjelaskan bahwa manajemen adalah seni untuk melakukan penyelesaian dari kegiatan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui orang lain guna melaksanakan semua tugasnya baik individu maupun tugas bersama. Lain halnya menurut Shafritz dan Russel memberikan penjelasan bahwa manajemen merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab dalam mengimplementasikan organisasi dan mekanisme melakukan organisasi itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya guna tercapainya tujuan organisasi.

G.R Terry dalam Safroni (2012) menjelaskan bahwa manajemen adalah mekanisme yang unik dengan terdiri dari mekanisme tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditemukan melalui pemanfaatan dari sumber daya. Sedangkan, Jawangga (2019) manajemen merupakan kemudi bagi sebuah perusahaan yang dipergunakan sebagai alat untuk

mengatur, mengorganisasi, dan mengarahkan keseluruhan kegiatan baik dalam organisasi, badan usaha, maupun perusahaan dalam usaha untuk pencapaian tujuan.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai penjelasan manajemen manajemen dapat dipahami juga sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan mekanisme pengawasan mengenai aktivitas yang dilakukan guna pencapaian target yang terdapat dalam organisasi dengan pengoptimalisasian kemampuan dan potensi *resource* yang ada. Manajemen publik memfokuskan bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan dengan optimal kebijakan yang sudah disusun agar dapat dilaksanakan dan memberikan pengelolaan yang baik bagi masyarakat atau penerima manfaat.

Sistem manajemen publik memberikan pelayanan dan barang publik untuk mencapai kesejahteraan bagi warga negara. Manajemen publik dipengaruhi oleh subsistem lain seperti sistem ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya. Manajemen publik merupakan studi interdisipliner dari beberapa aspek umum organisasi dan merupakan gabungan dari fungsi manajemen seperti halnya *planning, organizing, actuating, and controlling*. Dan juga terdapat beberapa aspek didalamnya yang diatur yakni mengenai pemanfaatan sumber daya, anggaran, fisik, informasi, material, dan juga politik (Keban, 2014).

1.6.4 Governance

Governance pada awalnya diperuntukkan oleh BI pada tahun 1989 sebagai bentuk masukan dan konsep pemajuan negara di Afrika Sub-Sahara. Bank Dunia pada tahun 1992 memberikan definisi bahwasannya *governance* merupakan

manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. Bovaird and Loffler (dalam Pratikno,2017) memberikan penjelasan bahwa *governance* merupakan cara *stakeholders* dalam melakukan interaksi guna mempengaruhi *outcome* kebijakan publik.

Dwiyanto (2004) memberikan penjelasannya mengenai *governance* berhubungan dengan tiga hal yakni dimensi kelembagaan, dimensi nilai, dan dimensi proses. Sebagai instrument perbaikan maka dalam penamannya perlu diimbuhkan kata *good*, sehingga berbentuk *good governance*. Bank Dunia mengkonsep *good governance* sebagai mekanisme dalam melakukan manajemen sumber daya sosial dan ekonomi suatu negara.

G. H Addink (2003) memberikan penjelasan bahwasannya *good governance* merupakan hubungan antara pejabat dengan rakyatnya. Oleh karenanya dalam hal ini *good governance* memberikan pemahamannya mengenai berbagai pemahaman. *Pertama*, berkaitan dengan hak-hak fundamental. *Kedua*, adanya efektivitas dan transparansi dalam memberikan pelayanan publik. *Ketiga*, perwujudan pelaksanaan akuntabilitas dari pemerintahan. *Keempat*, adanya pengembangan dari adanya aturan hukum.

Berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli dan sumber diatas dapat kita pahami dan simpulkan bahwa prinsip *good governance* adalah prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dalam proses pengelolaan potensi sumber daya yang ada melalui optimalisasi interaksi berbagai komponen didalamnya yang bertujuan pembangunan dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) *good governance* ini mempunyai 8 konteks utama dalam penerapannya. Berikut ini adalah penjabarannya,

1. *Participation*
2. *Rule of law*
3. *Transparency*
4. *Responsiveness*
5. *Consensus oriented*
6. *Equity*
7. *Effectiveness and efficiency, and*
8. *Accountability*

Kemudian, mengenai prinsip *good governance* menurut UNDP (dalam (Handayani & Nur, 2019)) terbagi menjadi empat belas prinsip, yakni partisipasi masyarakat, orientasi kedepan, transparansi, demokrasi, kompetensi dan profesionalisme, mitra usaha, desentralisasi, komitmen lingkungan hidup, komitmen kesejahteraan, keefesienan, keefektifan, dan daya tanggap.

1.6.5 Kelembagaan

Kelembagaan meliputi dua makna yakni norma serta konvensi dan aturan main. Kelembagaan terkadang ditulis dengan resmi dan didukung aparat berwajib, namun kelembagaan berbentuk non tertulis secara formal contohnya pada peraturan adat dan aturan yang diyakini masyarakat. Kelembagaan secara umum merupakan korelasi kepentingan atau mekanisme guna kelangsungan sekumpulan kepentingan. Nuraini, dkk. (2016) memberikan penjelasan bahwa kelembagaan merupakan

aktivitas menyeluruh dalam konteks monitor atau yurisdiksi, liberalisme dan ekspansi kegiatan dari seorang pribadi.

Kelembagaan menjadi rangkaian dari keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan kegiatan yang mempunyai pusat pada lingkup kegiatan dasar. Mekanisme kelembagaan diupayakan untuk mencapai target dan mewujudkan ketercapaian bermacam-macam kebutuhan sesuai fungsinya. Kelembagaan menjadi konsep utuh pada serangkaian struktur dengan berhubungan aktivitas lahir dari segi sosial guna pemenuhan tujuan bersama.

Hadi (2015) menjelaskan bahwa dalam kelembagaan memiliki beberapa prinsip, yakni berhubungan dengan *existing condition*, kebutuhan, berfikir dalam kesisteman, partisipatif, efektivitas, efisiensi, keluwesan, nilai tambah atau keuntungan, desentralisasi, dan keberlanjutan. Mutu kelembagaan mempunyai peran yang penting dalam mendukung pengaruh signifikan dalam peningkatan kemajuan suatu masyarakat dan derajat kesejahteraannya. Dengan demikian, kualitas dari kelembagaan menjadi hal yang fundamental untuk ada dan sebagai kesuksesan perencanaan strategis.

Interaksi dari teori kelembagaan sebuah organisasi memunculkan sebuah teori kelembagaan baru. Nuraini, dkk. (2016) memberikan penjelasan bahwasannya terdapat tiga pilar dalam interaksi kelembagaan, yakni sebagai berikut:

1. Pilar regulatif, adalah pilar dengan berfokus pada *rules* yang dimiliki dan profit saja yang akan didapatkan dalam melakukan tindakannya. Pilar ini mempunyai dugaan bahwasannya masyarakat mempunyai norma dan sikap berdasarkan norma tersebut.

2. Pilar normatif, adalah pilar yang berpondasi pada norma yang hidup dan juga diyakini dalam masyarakat. Bahwasannya sikap manusia secara individu atau kelompok sangat berhubungan dengan aturan didalamnya
3. Pilar kultural kognitif, menetapkan konsentrasi pada pemahaman budaya yang dipunyai guna memaknai segala hal yang ada disekitarnya. Termasuk didalamnya mengenai norma dan regulasi.

Nugroho (2016) memberikan penjelasan terkait analisis kelembagaan mempergunakan pendekatan kerangka kerja yakni melalui keempat komponen. Berikut ini komponen yang dipergunakan dalam analisis kelembagaan,

1. Struktur kelembagaan
2. Karakteristik sumber daya
3. Perilaku aktor
4. Kinerja

Konsep analisis kelembagaan selanjutnya dari Ostrom (2011) dalam (Rohman & Prantama, 2023) yang penekanannya berhubungan dengan pengambilan keputusan dari adanya kebijakan. Teori ini disebut dengan *Institutional Analysis and Development (IAD)*, memiliki beberapa indikator, yakni:

1. *Biophysical condition*, berbicara terkait keselarasan mengenai aturan dan keadilan dengan didasarkan pada relevansi konteks
2. *Attributes of community*, menganalisis mengenai aspek budaya dan sosial dalam problematika yang ada secara aktual
3. *Rules in use*, membahas mengenai norma dan aturan yang dipergunakan oleh aktor

4. *Action situations*, membahas mengenai pelaku yang bertindak dalam pencarian mekanisme penerimaan hingga luaran adanya interaksi yang dilakukan
5. *Outcomes*, membahas mengenai luaran pelaksanaan sebuah kegiatan
6. *Evaluative criteria*, membahas mengenai evaluasi guna dilakukan perbaikan

Kelembagaan dalam melakukan analisis keberjalanannya perlu dilakukan tinjauan kelembagaan. Adanya tinjauan kelembagaan ini sangat penting mengingat diupayakan untuk mengetahui dan menilai bagaimana kelembagaan terkait mampu melaksanakan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya dan bagaimana untuk meningkatkan segi dampak perbaikannya. Burke & Litwin (1992) dalam (Whaites, 2023) dalam bukunya yang berjudul *Understanding Institutional Analysis* menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi yang dipergunakan dalam melakukan tinjauan kelembagaan, meliputi fokus di luar institusi, pemahaman institusi, berfokus pada keluaran, mempertimbangkan pengalaman yang sebanding, dan analisis rencana aksi rekomendasi.

Penelitian ini dianalisis dari dimensi pemahaman institusi mengingat adanya korelasi dengan identifikasi permasalahan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah disebabkan dari adanya mekanisme pengurangan, penanganan, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, penyelenggaraan kelembagaan, dan pemrosesan akhir yang secara keseluruhan berkaitan dengan bagaimana institusi melakukan pengelolaan sampah dengan optimal. Oleh karena itu, dimensi kedua pemahaman institusi menjadi fokus tinjauan penelitian. Berikut ini adalah indikator dalam dimensi kedua, yakni

1. Kepemimpinan

Amri & dkk (2022) memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan adalah mekanisme yang diupayakan *leader* dalam kelembagaan dengan menggunakan pengaruhnya guna pencapaian tujuan bersama melalui hubungan yang baik dan sinergis. Dapat dipahami, kepemimpinan dalam penilainnya mempergunakan ukuran keberhasilan ketercapaian tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Dalam prosesnya kepemimpinan terbentuk dari perkembangan baik individu, organisasi, dan situasi. Indikator kepemimpinan berdasarkan definisi Amri & dkk (2022) terdiri dari *leading sector*, visi dan misi serta tujuan, dan hubungan antar lembaga.

2. Strategi

Bryson (2016) menjelaskan bahwa strategi adalah pola tujuan mengenai perincian akan bagaimana sebuah organisasi berjalan, apa yang akan dikerjakan sebuah organisasi, dan alasan yang diambil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Strategi dapat dipahami juga sebagai rencana yang diterapkan guna mencapai target yang sudah atau yang akan ditetapkan. Hal yang menjadi perhatian dalam manajemen strategi adalah kepastian bahwa sasaran akan dapat dicapai, kapan target akan direalisasikan, dan apa saja sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan guna mencapai tujuannya. Indikatornya dalam hal ini mengenai perencanaan strategis kelembagaan, mekanisme dan prosedur kerja, dan pengembangan lembaga/pegawai.

3. Komunikasi

Harold D. Lasswell dalam (Amri & dkk, 2022) memberikan penjelasan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dapat

disimpulkan yang dimaksud oleh Lasswell mengenai komunikasi adalah upaya untuk penyampaian dan penerimaan pesan dengan mencakup beberapa unsur, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, dan *impact*.

4. Norma Informal dan Formal

Norma formal adalah suatu aturan yang dijalankan dengan dirumuskan oleh pihak yang memiliki kewenangan tinggi, yakni pemerintah maupun lembaga resmi yang berguna melakukan pengaturan masyarakat atau kelembagaan dan kepastian keputusan bersama yang formal. Norma formal ini dipergunakan untuk mengatur prosedur operasional, alokasi sumber daya, dan penggunaan dana anggaran pemerintah. Sedangkan, norma informal adalah norma yang dilakukan dalam kelembagaan yang diupayakan untuk memastikan tugas terselesaikan dan memperlancar hubungan kerja antar lembaga yang juga tergantung dari konsep kelembagaan dan kepemimpinan yang dijalankan (Budiharsana & Heywood, 2017).

5. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sebuah kelembagaan yang memberikan dorongan pendanaan, sumber daya manusia, dan *social capital*. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa sumberdaya ada keterkaitannya dengan sumber pendanaan (berasal dari publik dan privat), sumber daya manusia (human capital), dan *social capital* (Budiharsana & Heywood, 2017).

1.7 Operasionalisasi Konsep

Peneliti mengemukakan konseptual guna menuntun penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian dengan judul “Analisis Kelembagaan

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang.” Dengan adanya penjelasan terhadap berjalannya pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Maka, peneliti melakukan tinjauan kelembagaan dengan berdasarkan dimensi pemahaman institusi dari Burke & Litwin (1992) dalam (Whaites, 2023) dalam bukunya yang berjudul *Understanding Institutional Analysis* yang mencakup beberapa indikator, yakni:

1. Kepemimpinan

- a. Adanya upaya yang dilakukan seorang pemimpin dalam kelembagaan dengan menggunakan pengaruhnya guna pencapaian tujuan bersama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
- b. Hubungan yang baik dan sinergis dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang

2. Strategi

- a. Adanya perencanaan strategis kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
- b. Adanya mekanisme dan prosedur kerja dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
- c. Adanya pengembangan lembaga/pegawai terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang

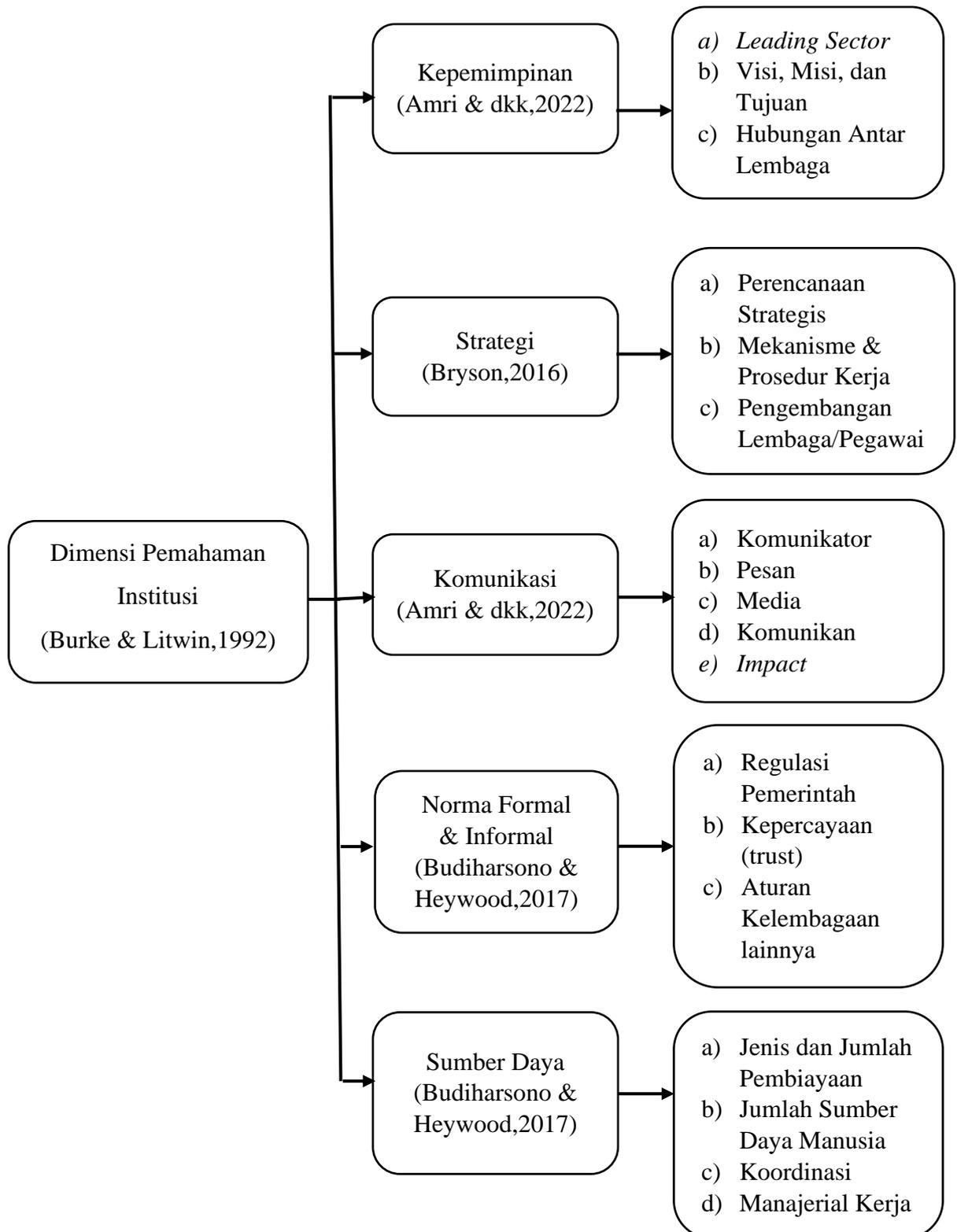
3. Komunikasi

Indikatornya mengenai komunikator, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, komunikan/audiens, dan *impact* terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

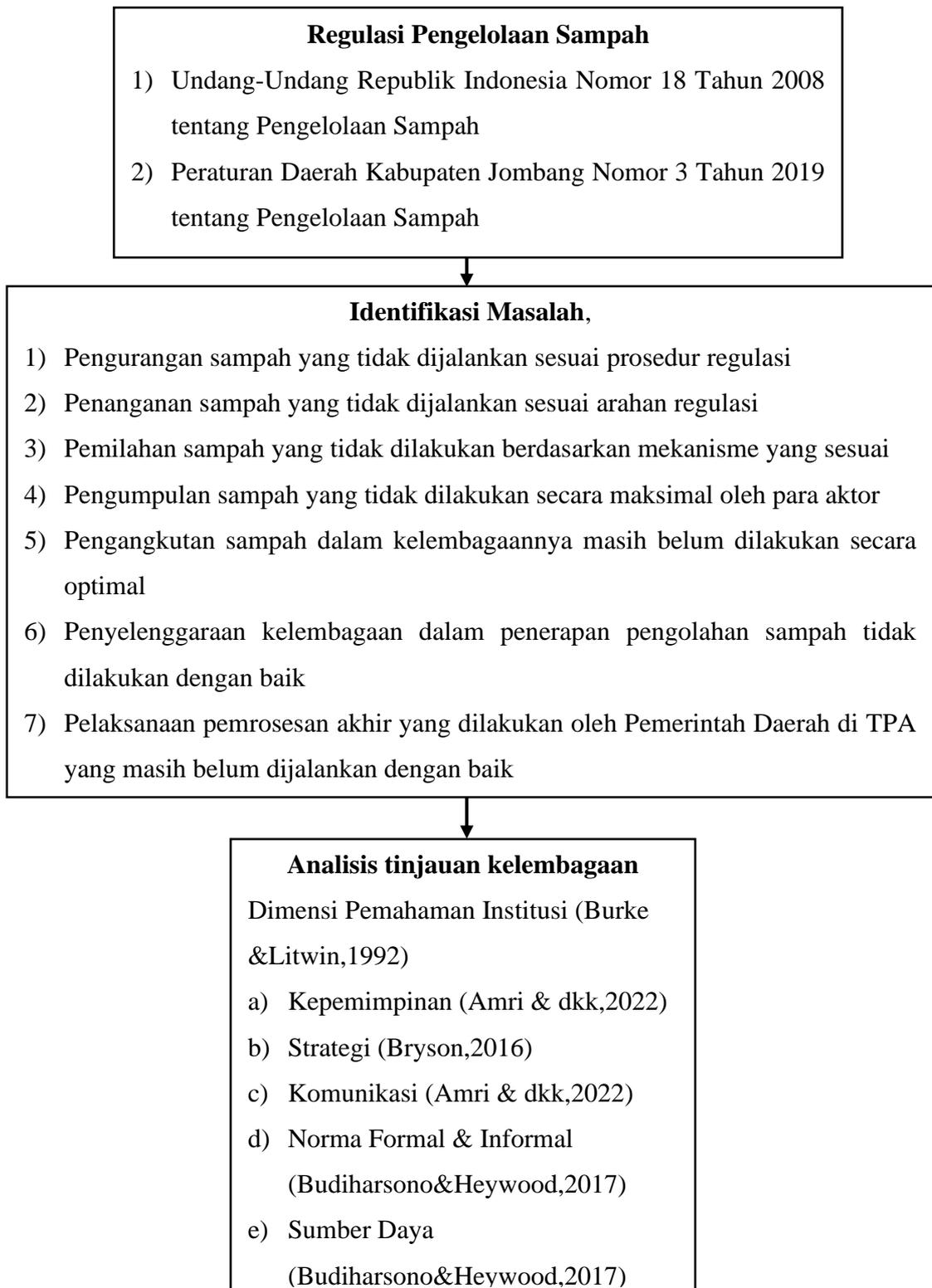
- a. Adanya komunikator dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang

- b. Adanya penyampaian pesan/informasi mengenai transparansi pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
 - c. Adanya media yang digunakan dalam penyampaian informasi pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
 - d. Adanya komunikasi/audiens dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
 - e. Adanya *Impact* terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
4. Norma Informal dan Formal
- a. Adanya regulasi (norma formal) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
 - b. Adanya saling kepercayaan (trust) dari berbagai lembaga dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
 - c. Adanya aturan kelembagaan lainnya yang mengatur kerjasama kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
5. Sumber Daya
- a. Adanya pendanaan dalam menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang
 - b. Adanya sumber daya manusia atau pihak aparaturnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang

Berikut ini operasionalisasi konsep dalam melakukan tinjauan kelembagaan dari dimensi pemahaman institusi,



1.8 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.9 Argumen Penelitian

Pengelolaan sampah menjadi hal yang utama dilakukan oleh suatu daerah dalam kewenangannya pada otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Jombang, memiliki kewenangan utama sebagai *leading sector* dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Jombang. Timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Jombang dari empat tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu, diperkuat dengan kurang meratanya tempat pengolahan sampah (TPS) masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang.

TPA Banjardowo merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di Kabupaten Jombang dan setiap hari selalu menerima banyak sampah dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang. Masalah ini tentu akan menjadikan TPA Banjardowo *overload* dan tidak akan mampu menampung sampah yang ada. Manajemen pengelolaan sampah oleh kelembagaan dan UPT menjadi poin mendasar yang harus dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat permasalahan sampah di Kabupaten Jombang menjadi hal yang utama dalam hal pelestarian lingkungan.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan melakukan analisis kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang berdasarkan aspek kelembagaan. Informan riset merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Seksi Pengurangan Sampah DLH Kabupaten Jombang, Petugas UPT Pengelolaan Sampah, Petugas Bank Sampah Induk Jombang, dan Petugas Kebersihan Kabupaten Jombang

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian yang berjudul “Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang” merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan suatu gejala sosial mengenai permasalahan pengelolaan sampah dan tinjauan kelembagaan.

1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DLH Kabupaten Jombang dalam menganalisis pelaksanaan kelembagaan di Kabupaten Jombang mengenai pengelolaan sampah guna mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman dan aman dan tidak merusak ekosistem yang ada. Peneliti memilih lokus di Kabupaten Jombang dikarenakan masih kurang optimalnya dalam pengelolaan sampah. *Pertama*, pengurangan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. *Kedua*, penanganan sampah yang tidak dijalankan sesuai prosedur penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

Ketiga, pemilahan sampah yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. *Keempat*, pengumpulan sampah yang tidak dilakukan secara maksimal oleh para aktor yang terlibat di dalamnya. *Kelima*, pengangkutan sampah dalam kelembagaannya sebagai pelaksana dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang kurang. *Keenam*, penyelenggaraan kelembagaan

penerapan pengolahan sampah tidak dilakukan dengan baik. *Ketujuh*, pelaksanaan pemrosesan akhir dari Pemda di TPA yang masih belum dijalankan dengan baik

1.10.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini berelevansi dengan topik yang diteliti, yakni mengenai analisis kelembagaan yang dilakukan di Kabupaten Jombang dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini dalam menentukan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2015) memberikan penjelasan bahwa *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada standar dan kriteria yang tepat dalam penelitian tersebut.

Adapun informan dalam pelaksanaan untuk pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
3. Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Seksi Pengurangan Sampah DLH Kabupaten Jombang
4. UPT Pengelola Sampah di Kabupaten Jombang
5. Pegawai Bank Sampah Induk Jombang
6. Petugas Kebersihan di Kabupaten Jombang

1.10.4 Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti mempergunakan data kualitatif yang merupakan data kumpulan dari bentuk kata-kata, gambar, dan tulisan. Peneliti dalam hal pelaksanaan penelitian ini berperan sebagai instrumen itu sendiri. Hasil data-data

ini yang akan dipergunakan dalam mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kelembagaan yang dilakukan di Kabupaten Jombang dalam pengelolaan sampah.

1.10.5 Sumber Data

Data primer riset ini melalui wawancara kepada informan yang memiliki keterhubungan langsung dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga petugas yang ada di TPA Banjardowo. Kemudian, data sekunder diperoleh dari pihak lain atau secara tidak langsung berupa catatan-catatan, buku, literature, koran, dokumen, laporan, artikel, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Jadi, dalam mekanisme penemuan data sekunder ini yang berkorelasi dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara menjadi hal yang penting dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan wawancara melibatkan individu sebagai subjek pelaku atau narasumber. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa teknik ini mempergunakan pedoman wawancara yang sudah direncanakan dan sistematis serta rinci. Berlandaskan poin-poin tertentu yang akan ditanyakan kepada narasumber dan mempergunakan *open question* guna memperoleh jawaban yang menyeluruh karena peneliti membutuhkan jawaban yang mendalam.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dengan menghimpun, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar, ataupun dokumen elektronik seperti halnya buku-buku referensi, artikel jurnal, dan media lainnya yang mendukung objek penelitian. Studi pustaka menjadi hal yang penting dilakukan guna menunjang data riset yang diterapkan dalam pengolahan sampah di Kabupaten Jombang.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data penelitian ini mempergunakan analisis kualitatif, sehingga peneliti diharuskan menemukan poin-poin penting dari beberapa data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Tahapan yang dipergunakan dalam melakukan analisis data dalam (Lesmana. dkk,2016), yakni:

1. Reduksi Data

Merupakan proses guna melakukan pengolahan data dari hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Peneliti juga memanfaatkan Software Atlas.Ti dalam menganalisis hasil transkrip wawancara untuk mengidentifikasi keyword penelitian yang akan dilakukan.

2. Penyajian Data

Upaya penyajian data dengan melakukan analisis bentuk dari gambaran atau peta persebaran dengan Software Atlas.Ti maupun melalui mekanisme observasi.

3. Interpretasi Data

Merupakan proses penyimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan pengolahan untuk disajikan secara jelas dan dapat dijadikan sebuah metode untuk menentukan keputusan.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data mempunyai penjelasan mengenai sebuah keakuratan dan kelengkapan data yang sudah diberikan. Kualitas data ini berkorelasi mengenai keajekan dan juga efisiensi yang diambil dalam memperkuat argumen atau permasalahan yang sedang dibahas. Kelengkapan data dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa informasi yang diberikan dapat mewakili atau melengkapi seriap keadaan sebenarnya dan tidak berupa data yang mengada-ngada (spekulasi penulis). Kualitas data juga dapat diamati dari bagaimana relevansi pembahasan yang diteliti penulis dengan keterbaruan / updating data dari pihak tujuan penelitian, segi keterbaruan data menjadi hal yang penting untuk ada.

Kualitas data memiliki keterhubungan dengan sebuah analisis data, teknik analisis data menjadi hal penting yang diterapkan untuk mengukur dan menilai seberapa berkualitasnya sebuah data. Penelitian yang dilakukan penulis ini menerapkan analisis data triangulasi. William Wiersma dalam Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa triangulasi pengukuran keaslian adalah pengecekan data melalui berbagai referensi dengan metode yang sudah ditetapkan, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan juga waktu yang dipergunakan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk melakukan pengujian terhadap kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh seorang peneliti nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan dan di bagian akhirnya akan mendapatkan kesepakatan. Dalam hal ini, akan dilakukan upaya pemahaman dari berbagai pendapat yang ada dalam sumber tersebut untuk dikerucutkan kesimpulan yang paling mendekati keterhubungan.

2. Triangulasi Teknik/Cara

Triangulasi yang kedua adalah teknik/cara, yang dilakukan untuk melakukan pengecekan. Cara yang dapat dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Namun, apabila dari kedua cara tersebut masih belum didapatkan data yang paling tepat harus dilakukan pengujian selanjutnya mengenai referensi terkait. Tujuannya kepastian data yang paling benar dari sekian data tersebut benar, namun memiliki cara pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Trianggulasi waktu diterapkan dengan melalui mekanisme pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga menemukan kepastian datanya. Waktu yang dipergunakan peneliti yakni ketika pagi dan siang.